

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan yang berintegritas diharuskan menyajikan informasi secara jujur, akurat, dan mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Ikatan Akuntan Indonesia (2015) mengatur apabila laporan keuangan harus disusun berkaitan pada prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman, serta harus merepresentasikan kondisi ekonomi entitas dengan cara sewajarnya. Laporan keuangan ialah bentuk penyampaian informasi yang disusun dengan cara sistematis guna menggambarkan kondisi serta performa keuangan suatu entitas, yang bertujuan membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Mengacu pada *International Financial Reporting Standards* (IFRS), laporan keuangan setidaknya tersusun atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sebagai bagian lengkap informasi keuangan. Informasi yang disajikan harus mencakup seluruh transaksi material, tidak boleh mengaburkan data penting, dan memberikan pengungkapan yang memadai mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan (Nasihin et al., 2025).

Financial Accounting Standard Board (FASB), melalui *Statement of Financial Accounting Concept* No. 2, telah mempertegas keterkaitan laporan keuangan berintegritas harus diwajibkan terpresentasikan secara wajar, jujur, dan dengan ketidakhiasannya. Istilah wajar dalam laporan keuangan mengacu

pada penyajian transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Laporan keuangan juga harus mudah dipahami oleh pengguna, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, serta harus mematuhi parameter mutu data keuangan entitas. Kendati itu, arti lebih luas integritas pada lingkup laporan keuangan telah memberi representasi seberapa luas laporan berhasil memvisualisasikan keandalan informasi, kerelevanan, dan keaslian informasi, sehingga dapat menjadi dasar yang valid dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ilmiah & Dan, 2025).

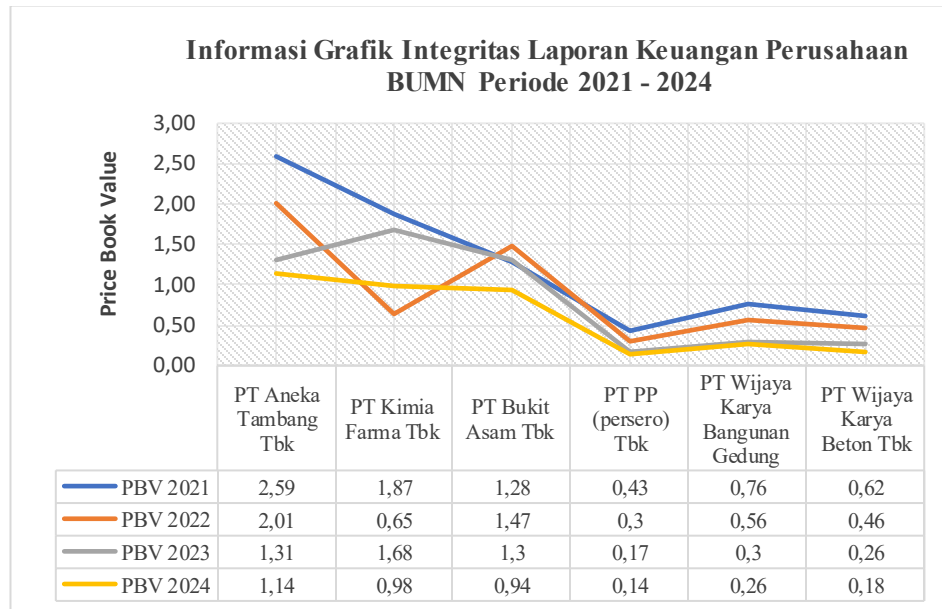
Mekanisme pelaporan keuangan suatu perusahaan perlu melalui proses pemeriksaan audit agar tingkat keabsahan dan keandalannya dapat dipertanggungjawabkan. Audit dilakukan agar mencapai kebutuhan seluruh pihak terhadap informasi akuntansi secara benar serta berkesesuaian atas standarisasi regulatif akuntansi yang sudah terstandarisasi. Kegiatan audit ini dilakukan oleh akuntan publik yang bersifat independen, sehingga proses pengujiannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun. Secara sederhana, audit merupakan proses membandingkan kondisi yang sebenarnya terjadi dengan ketentuan atau standar yang seharusnya diterapkan. Tanpa proses audit, laporan keuangan berpotensi mengandung kesalahan, baik yang terjadi secara tidak sengaja maupun yang disengaja, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan (Vidada et al., 2020).

Auditing perspektif ASOBAC (*A Statement Of Basic Auditing Concept*) merupakan suatu prosedur yang disusun sistematis dan objektif mengenai hasil pernyataan terkait seluruh kejadian untuk memperoleh, mengevaluasi bukti dan

menentukan rasio konsistensi antar klausul yang diperoleh dengan aturan yang ditetapkan (Hadi et al., 2020). Audit laporan keuangan didefinisikan sebagai penilaian terhadap laporan keuangan yang telah tersaji kan berdasarkan pada pernyataan apakah sesuai atau tidak berdasarkan regulasi pelaporan keuangan yang terstandarisasi. Independensi yang dimiliki seorang auditor diharuskan tetap mempertahankan integritas dan juga objektivitas supaya tidak terjadi salah saji material. Laporan keuangan akan dinilai berintegritas jika dapat meningkatkan kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan lain guna untuk pengambilan keputusan.

Audit yang berkualitas berarti bahwa auditor mampu mempertahankan kualitas independensi dengan bersikap netral, jujur, tidak memihak ataupun mempercayai klien tanpa adanya bukti materil yang mendukung proses audit. Selain itu, pengawasan pelaporan keuangan juga menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan hal tersebut dapat tercermin dari hasil penyajian laporan keuangan suatu perusahaan guna untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Namun, kejadian dilapangan yang muncul kadang tidak sesuai dengan teori yang ada dan berdampak pada hasil laporan keuangan perusahaan. Integritas laporan keuangan di Indonesia menghadapi tantangan serius terlebih pada perusahaan terbuka milik negara. Entitas terbuka yang tercatat dalam pasar modal domestik dituntut menyajikan dan mengungkapkan laporan yang sesuai aturan dan standar yang berlaku dan telah dilakukan audit. Kondisi nyata yang terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara terkait integritas laporan

keuangan terlihat dalam informasi grafik tren laporan tahunan yang dirilis oleh Bursa Efek Syariah selama periode 2021 hingga 2024 berikut.



Sumber: Data diolah peneliti dari Bursa Efek Indonesia, 2025.

Gambar 1.1 Data integritas laporan keuangan beberapa perusahaan BUMN periode 2021 hingga 2024.

Dari gambar data grafik tren diatas dapat dilihat bahwa perusahaan BUMN yang diantaranya memiliki riwayat kasus skandal manipulasi laporan keuangan yang menjadi isu hangat dikalangan para investor. Berdasarkan gambar data grafik tren laporan tahunan yang dirilis oleh Bursa Efek Syariah (BEI), dapat diamati bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan integritas laporan secara signifikan dari tahun ke tahun. Fenomena penurunan integritas secara signifikan pada laporan keuangan perusahaan BUMN yang diukur oleh formulasi *Price Book Value* (PBV) yang membandingkan harga setiap lembar saham berdasarkan pada nilai buku tiap per lembar saham tersebut

mengindikasikan lemahnya pengawasan audit dan memungkinkan adanya permasalahan dalam sistem pelaporan keuangannya.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh berita isu skandal audit yang beredar pada perusahaan *go public* BUMN diantaranya pada sektor pertambangan yakni pada PT Timah Tbk Perusahaan di sektor pertambangan, audit BPKP menyebutkan bahwa kerugian negara mencapai Rp300 triliun selama periode 2015 hingga 2022 akibat praktik pertambangan ilegal serta malpraktik distribusi sektor timah. Dalam kluster industri sejenis yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dilaporkan merugikan pemerintah hingga Rp3,3 triliun pada periode 2010 sampai dengan 2021 karena kejahatan pemalsuan sistemik pada komoditas logam mulia sebesar 109 ton. Selanjutnya, pada sektor transportasi, PT Garuda Indonesia Tbk diindikasikan melakukan pembelian unit bombardier CRJ-1000 serta ATR 72-600 dengan meniadakan pengoperasian secara prosedural yang telah disetujui oleh dewan komisaris, mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp8,8 triliun (Tempo, 2025).

Tidak berhenti disitu, situasi serupa juga terjadi di beberapa sektor terbuka lain terkait kurangnya integritas suatu laporan keuangan, diantaranya ada di sektor infrastruktur, PT Waskita Karya Tbk menyebabkan kerugian negara senilai Rp2,5 triliun dikarenakan kejahatan manipulasi realisasi dana proyek dengan menggunakan dokumen fiktif untuk melunasi liabilitas korporasi. Laporan keuangan WSKT diduga "dipoles" dari tahu 2016 agar tampak seolah-olah untung, padahal arus kas perusahaan tidak positif (Puspadini, 2023).

Persoalan lainnya yang hingga masa kini sudah menjadi berita hangat dikalangan perusahaan BUMN yakni pada sektor farmasi. Dilansir dari CNBC Indonesia, PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM), diduga terlibat pada kasus manipulasi yang berpotensi merugikan hingga Rp371 miliar. Hasil temuan BPK yang mengindikasikan terdapat suatu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, meliputi penambahan nilai persediaan, rekayasa transaksi, dan pencatatan fiktif. Menariknya, pada periode 2020 dan 2021, opini audit atas asersi keuangan INAF melalui lembaga intervensi auditor eksternal Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) justru memperoleh opini "wajar tanpa modifikasi" atau *unqualified opinion*. Meskipun KAP yang sama menangani audit tahun 2022, terdapat perubahan bahasa dalam laporan yang menyoroti tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi hal-hal signifikan dalam audit konsolidasian (Sandi, 2024).

Perusahaan publik termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertindak sebagai determinan utama dalam perekonomian skala makro domestik sebagai tumpuan atau penopang pendapatan negara dan seharusnya penyajian laporan keuangan BUMN dilakukan secara transparan dan integritas. Hasil laporan keuangan dapat dinyatakan wajar dan bebas dari kesalahan, terutama pada kelembagaan terbuka maupun kelembagaan yang sudah *go public*, pemeriksaan oleh auditor independen menjadi sangat penting. Meskipun secara normatif laporan keuangan perusahaan publik wajib disusun sesuai standar dan telah melalui proses audit oleh auditor independen, berbagai fenomena empiris

menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan teori. Sejumlah kasus besar pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam integritas pelaporan keuangan, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut telah diaudit dan memperoleh opini wajar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme pengawasan formal dengan kualitas integritas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi audit dan strukturisasi suatu entitas. Faktor yang menjadi parameter pengaruh keintegritasan suatu laporan keuangan menurut Tania & Gustini (2025) ialah audit *tenure* dan komite audit. Hasil penelitian tersebut selaras dengan teori agensi (*agency theory*) yang menyatakan hubungan keagenan muncul ketika pemilik perusahaan memberikan kepercayaan kepada pihak lain.

Audit *tenure* ialah durasi lamanya keterikatan auditor dengan klien. Audit *tenure* merujuk pada waktu keterikatan hubungan profesional auditor dengan perusahaan klien dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan setiap periode. Secara teoritis lamanya perikatan waktu antara auditor dengan perusahaan atau klien secara berturut-turut dapat meningkatkan pemahaman terkait proses evaluasi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas. Namun, dalam kenyataannya independensi auditor terkadang akan menurun jika *tenure* yang terjadi dapat membentuk keterikatan secara emosional maupun psikologis dengan klien (Hadi et al., 2020).

Upaya menghindari salah saji dan sebagai bentuk pengawasan suatu aktivitas internal diperlukan pengendalian. Pengendalian internal berkaitan

dengan aktivitas perusahaan klien yang disebut komite audit/asesrsi. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit/asersi berarti memiliki kedudukan dalam tim berkompeten dan independen yang terbentuk karena arahan dewan komisaris atau dewan pengawas. Aturan tentang komite audit BUMN ada dalam UU No. 19 Tahun 2003 menegaskan apabila dewan pengawas BUMN diwajibkan menyusun komite audit secara berkompentensi linier serta berkolektivitas kerja. Peran serta responsibilitas komite audit pada dasarnya agar dapat mendukung dewan komisaris supaya mampu mengimplementasikan peran fungsi pengawasan, khususnya terhadap prosedur pemeriksaan laporan, pengendalian manajerial dan risiko, sekaligus aktualisasi kegiatan asersi. Komite audit diketuai seorang ketua yang mengemban tanggung jawab secara operasional terhadap direksi dan wajib memiliki sikap independen. Selain itu, komite audit harus tersusun dalam minimal 3 anggota, dalam hal ini termasuk pada ketua komite audit tersebut (Ardianingsih, 2018).

Faktor pertama yang dapat menjadi pengaruh integritas suatu laporan keuangan ialah audit *tenure*. Secara teoritis, audit *tenure* memiliki dua dampak yang bertolak belakang. Di satu sisi, masa perikatan audit yang berlangsung terlalu lama dapat menurunkan independensi auditor karena munculnya kedekatan secara emosional maupun psikologis dengan klien. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian Maisyaroh, Taufik & Badriyah pada tahun 2025 menyatakan bahwa masa perikatan waktu (audit *tenure*) memberikan pengaruh individual pada integritas laporan keuangan (Maisyaroh et al., 2025). Tetapi pada kenyataan lain, hubungan kerja sama yang berlangsung dalam jangka

panjang antara kedua belah pihak auditor dan klien dapat membantu auditor memahami karakteristik perusahaan serta risiko bisnis yang dimiliki, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Tanuwijaya dan Dwiayanti pada tahun 2022 yang menunjukkan apabila audit tenure tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan (Tanuwijaya & Dwijayanti, 2022). Inkonsistensi hasil penelitian tersebut memperkuat ketidakjelasan hubungan audit *tenure* pada integritas laporan keuangan. Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan apabila masa perikatan waktu (audit *tenure*) memberikan pengaruh individual pada integritas laporan keuangan, sedangkan penelitian lainnya justru menemukan bahwa masa perikatan waktu (audit *tenure*) tidak menghasilkan pengaruh individual pada integritas laporan keuangan. Inkonsistensi temuan terdahulu memperlihatkan masih terdapat kesenjangan teoritis (*research gap*) yang memerlukan kajian mendalam, khususnya pada entitas terbuka Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Faktor kedua yang dapat menjadi pengaruh integritas suatu laporan keuangan ialah peran independen suatu komisaris atau dewan pengawas yang terbentuk dalam komite audit. Komite audit yang tersusun atas serangkaian individu independen serta memiliki kompetensi yang memadai dapat membantu menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan. Komite audit berperan selaku pihak pengawas memiliki kewajiban fungsional kepada dewan komisaris dalam upaya meminimalkan terjadinya manipulasi pada laporan keuangan. Keberadaan auditor independen dalam komite audit juga dapat mencegah praktik manipulasi

sehingga asersi keuangan yang tersaji menampilkan kredibilitas yang baik. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Dewi, Rustiani, dan Dewi pada tahun 2022 yang mengkonfirmasi variabel komite audit menghasilkan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Dewi et al., 2021) Namun, pernyataan tersebut ditolak dan tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Hidayat & Muanifah pada tahun 2025 menyatakan temuan pada pengkajian komite audit mempengaruhi secara negatif pada integritas laporan keuangan (Ilmiah & Dan, 2025).

Banyaknya fenomena yang bermunculan dari kasus-kasus besar perusahaan BUMN sebelumnya dan inkonsistensi dari temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa risiko rendahnya integritas pelaporan keuangan di perusahaan BUMN merupakan masalah faktual dan krusial yang masih terus terjadi. Isu integritas dan transparansi pengelolaan perusahaan terbuka yang terjadi di beberapa perusahaan BUMN berdampak pada kepercayaan publik, hal tersebut selaras dengan tujuan Bursa Efek Indonesia meluncurkan lima indeks syariah, salah satunya adalah IDX-MES BUMN 17. Indeks ini merupakan inisiatif strategis pasar modal syariah untuk mengakomodasi kebutuhan investor untuk berinvestasi pada saham-saham syariah, khususnya saham BUMN dan afliasinya yang memiliki fundamental baik. Namun data dan faktanya menurut analisis peneliti didasarkan pada informasi data laporan tahunan yang dirilis oleh BEI, masih terdapat fenomena mendasar yang memengaruhi keintegritasan laporan keuangan pada yang terdaftar secara konsisten dan berkesinambungan pada indeks IDX MES BUMN 17.

Berikut tabel terkait data audit *tenure* yang diukur berdasarkan durasi kontribusi KAP yang sama dalam pelaksanaan audit tahunan secara berturut-turut pada suatu perusahaan, komite audit yang dihitung berdasarkan total anggota yang tercantum di laporan tahunan, dan integritas laporan keuangan yang dihitung berdasarkan rumus *Price Book Value* dalam suatu perusahaan yang telah terinventarisasikan secara berturut-turut pada indeks IDX MES BUMN 17 periode 2021 sampai 2024:

Tabel 1.1 Data audit *tenure* dan komite audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar pada indeks IDX MES BUMN 17 Periode 2021 – 2024.

NO	Nama Perusahaan	KODE	Periode	Audit <i>Tenure</i>	Komite Audit	ILK
1	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	2021	1	4	2,59
			2022	2	4	2,01
			2023	3	4	1,31
			2024	1	3	1,14
2	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS	2021	1	8	2,93
			2022	2	6	1,78
			2023	3	7	2,07
			2024	4	7	2,80
3	PT Elnusa Tbk	ELSA	2021	1	3	0,53
			2022	2	3	0,55
			2023	3	3	0,64
			2024	4	3	0,69
4	PT Kimia Farma Tbk	KAEF	2021	1	5	1,87
			2022	2	5	0,65
			2023	3	4	1,68
			2024	1	3	0,98

NO	Nama Perusahaan	KODE	Periode	Audit Tenure	Komite Audit	ILK
5	PT Bukit Asam Tbk	PTBA	2021	1	4	1,28
			2022	2	4	1,47
			2023	3	4	1,3
			2024	1	4	0,94
6	PT PP (persero) Tbk	PTPP	2021	1	3	0,43
			2022	2	3	0,3
			2023	1	3	0,17
			2024	2	3	0,14
7	PT Semen Baturaja (persero) Tbk	SMBR	2021	1	3	2,05
			2022	2	3	1,24
			2023	1	4	0,87
			2024	2	4	0,62
8	PT Semen Indonesia (persero) Tbk	SMGR	2021	1	3	1
			2022	1	3	0,94
			2023	2	4	0,9
			2024	3	5	0,46
9	PT Timah Tbk	TINS	2021	1	4	1,72
			2022	2	3	1,24
			2023	3	3	0,77
			2024	1	3	1,07
10	PT Telkom Indonesia Tbk	TLKM	2021	1	6	2,75
			2022	2	6	2,49
			2023	3	6	2,5
			2024	4	5	1,65
11	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	WEGE	2021	1	3	0,76
			2022	2	3	0,56
			2023	3	3	0,3
			2024	4	3	0,26

NO	Nama Perusahaan	KODE	Periode	Audit Tenure	Komite Audit	ILK
12	PT Wijaya Karya Beton Tbk	WTON	2021	1	3	0,62
			2022	2	3	0,46
			2023	3	3	0,26
			2024	4	3	0,18

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Merujuk dalam tabel 1.1 tersebut pada entitas terbuka BUMN yang telah terinventarisasikan pada indeks IDX MES BUMN 17 periode 2021 sampai 2024, diperoleh informasi mengenai audit *tenure*, komite audit, serta integritas laporan keuangan. Pada variabel audit *tenure*, beberapa perusahaan seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WEGE) dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) memiliki audit *tenure* yang cenderung stabil, namun integritas laporan keuangannya tetap berfluktuasi. Sedangkan perusahaan lain seperti PT PP Persero Tbk (PTPP), PT Semen Baturaja (SMBR) Tbk, PT Semen Indonesia (SMGR) Tbk, dll. mengalami perubahan audit *tenure* antar tahun 2021–2024. Perubahan audit *tenure* tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja auditor dengan perusahaan tidak selalu berlangsung panjang dan berkelanjutan, sehingga kualitas pengawasan auditor dapat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan menunjukkan bahwa durasi hubungan antara pihak pemeriksa eksternal dan entitas klien belum tentu mampu menjamin kestabilan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pada variabel komite audit, mayoritas emiten memiliki ukuran keanggotaan komite audit berada pada interval konstan tiga hingga empat

personel setiap tahun. Namun, kesamaan struktur tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas integritas laporan keuangan. Misalnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT PP Persero Tbk (PTPP), dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menunjukkan penurunan nilai integritas laporan keuangan yang cukup signifikan pada beberapa periode pengamatan walaupun jumlah anggota komite audit tetap sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit secara jumlah belum tentu dapat menjamin efektivitas fungsi pengawasan, karena integritas laporan keuangan ditentukan oleh kualitas kompetensi, independensi, dan intensitas kerja komite audit, bukan hanya jumlah anggotanya.

Dari sisi integritas laporan keuangan (ILK), beberapa perusahaan seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) mengalami peningkatan dan cenderung stabil pada nilai ILK dari tahun 2021–2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta memperkuat mekanisme pengendalian internal. Sebaliknya, perusahaan lainnya cenderung banyak mengalami penurunan dan ketidakstabilan nilai integritas laporan keuangan pada tahun tertentu, menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam proses pelaporan keuangan ataupun indikasi lemahnya pengawasan internal yang dilakukan manajemen maupun auditor.

Fenomena pada tabel diatas terkait perubahan audit *tenure*, ukuran keanggotaan komite audit yang homogen, serta fluktuasi integritas laporan

keuangan yang ada dalam kelembagaan dengan cara berurutan yang terinventarisasikan pada indeks IDX MES BUMN 17 periode 2021–2024 memperlihatkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, masih belum berjalan secara optimal. Beberapa perusahaan yang audit *tenure* nya panjang justru tidak menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan, sementara perusahaan lain dengan audit *tenure* pendek mampu mempertahankan integritas yang lebih baik. Kondisi tersebut menjadi landasan penting untuk mengkaji pengaruh audit *tenure* serta komite audit dalam integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN terindeks saham syariah, mengingat perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab publik dan nilai strategis yang tinggi sehingga kualitas laporan keuangannya harus disajikan secara transparan, akurat, dan berintegritas tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang serta kompleksitas permasalahan yang terjadi secara umum hingga khusus di beberapa sektor perusahaan hingga fenomena khusus pada subjek yang diteliti dan menimbulkan perbedaan sudut pandang dan hasil penelitian terdahulu terkait integritas laporan keuangan. Dengan demikian, peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan pengkajian mengenai, **“Pengaruh Audit *Tenure* dan Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar Di Indeks IDX-MES BUMN 17 Periode 2021 - 2024”**

B. Identifikasi Masalah

Merujuk dalam latar belakang penelitian tersebut, beberapa persoalan utama yang mampu dilakukan identifikasi, antara lain:

1. Diragukannya integritas laporan keuangan dalam sistem kelembagaan BUMN dibuktikan dengan terungkapnya berbagai kasus manipulasi dan skandal keuangan dalam berbagai kelembagaan yang telah *go public*.
2. Berdasarkan sampel penelitian dari gambar data grafik tren tahunan perusahaan yang telah terinventarisasikan pada indeks IDX-MES BUMN 17 secara signifikan mengalami penurunan integritas laporan keuangan dari awal terbentuknya indeks tersebut di tahun 2021 hingga 2024.
3. Terdapat indikasi lemahnya independensi auditor akibat audit *tenure* yang panjang serta komite audit yang tidak independen dan tidak kompeten.
4. Terdapat inkonsistensi hasil pengkajian sebelumnya berkaitan dalam pengaruh audit *tenure* serta komite audit pada integritas laporan keuangan dibuktikan melalui temuan beberapa pengkajian atau studi yang menyatakan berpengaruh positif, sementara lainnya menunjukkan hasil negatif atau tidak berpengaruh.

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan membatasi ruang lingkup pembahasan agar tujuan penelitian dapat tercapai secara spesifik, kajian tersebut terbatas dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Kajian tersebut berfokus pada serangkaian perusahaan secara konsisten yang terinventarisasikan pada indeks IDX-MES BUMN 17 dalam periode 2021 sampai 2024.
2. Variabel bebas (independen) yang diteliti dibatasi hanya pada dua faktor utama, yaitu Audit *Tenure* dan Komite Audit.

3. Variabel terikat (dependen) yang diteliti ialah Integritas Laporan Keuangan, yang dikalkulasikan melalui indikator *Price Book Value* (PBV).
4. Data yang digunakan bersumber pada laporan tahunan (*annual report*) serta laporan keuangan audited perusahaan yang terinventarisasikan pada IDX-MES BUMN 17 serta informasi yang tersedia dalam BEI pada periode penelitian.

D. Rumusan Masalah

Merujuk terhadap hasil penjabaran dalam latar belakang, identifikasi masalah, hingga batasan masalah yang mana perumusan masalah pada kajian tersebut, antara lain:

1. Seberapa besar pengaruh audit *tenure* secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024?
2. Seberapa besar pengaruh audit secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024?
3. Seberapa besar pengaruh audit *tenure* dan komite audit secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk atas rumusan masalah yang sudah terjabarkan, sehingga tujuan pada pengkajian tersebut, antara lain:

1. Agar mampu menyatakan, mengetahui hingga melakukan analisis tentang besarnya pengaruh audit *tenure* secara parsial pada integritas laporan keuangan dalam kelembagaan yang terinventarisasikan dalam IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024.
2. Agar mampu mengetahui serta memberikan analisis mengenai besarnya pengaruh komite audit secara parsial pada integritas laporan keuangan dalam kelembagaan yang telah terinventarisasikan pada indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024.
3. Agar dapat memberikan pengetahuan serta menganalisis besarnya pengaruh audit *tenure* dan komite audit secara simultan pada integritas laporan keuangan dalam perusahaan yang telah terinventarisasikan pada indeks IDX-MES BUMN 17 periode 2021-2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian tersebut mampu diproyeksikan agar bisa memperkaya literatur serta dapat menyajikan suatu kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah, laporan keuangan dan auditing, khususnya pada perusahaan BUMN dan anak perusahaan terafiliasi yang terinventarisasikan pada indeks IDX-MES BUMN 17. Hasil kajian tersebut juga diharapkan mampu memperkuat atau memperluas temuan penelitian terdahulu terkait audit *tenure* maupun komite audit pada integritas laporan keuangan dalam lingkup indeks IDX-MES BUMN 17. Kajian tersebut mampu dijadikan sebagai landasan kepada para peneliti setelahnya yang akan melakukan

pengkajian secara lebih detail tentang isi integritas laporan keuangan, terutama untuk kasus-kasus di sektor yang berbeda atau dalam periode yang lebih panjang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX-MES BUMN 17

Hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan penting untuk mempertimbangkan kebijakan rotasi auditor atau membatasi jangka waktu perikatan audit (audit *tenure*) guna menjaga independensi auditor dan meningkatkan kepercayaan publik. Perusahaan dapat menggunakan temuan ini sebagai masukan atau saran kepada manajemen perusahaan dan dewan komisaris dalam mengevaluasi efektivitas fungsi komite audit mereka untuk meningkatkan pengawasan pelaporan keuangan.

b. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Pengkajian tersebut membantu investor, khususnya yang tertarik pada investasi syariah di indeks IDX-MES BUMN 17, dalam memahami serangkaian faktor yang memengaruhi integritas laporan keuangan, sebagai bahan pertimbangan agar dapat mengambil keputusan investasi secara lebih informasional serta terpercaya.

c. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kajian tersebut mengingatkan auditor akan pentingnya menjaga sikap independensi dan skeptisisme profesional, terlepas dari lamanya hubungan kerja sama dengan klien.